

## *Call for Proposal*

### **SUB-RECIPIENT (SR) NASIONAL COMMUNITY SYSTEM STRENGTHENING (CSS) DAN REMOVING LEGAL BARRIER (RLB)**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan pada tahun 2012 di Indonesia ada 591.823 orang yang hidup dengan HIV (ODHA). Sampai dengan triwulan 3 Tahun 2015, secara kumulatif sejak tahun 1987 telah dilaporkan temuan kasus HIV sejumlah 184.929 orang..

Upaya Penanggulangan AIDS sesuai yang tercantum dalam Strategi & Rencana Aksi Nasional (SRAN) 2015-2019 memiliki tujuan untuk Penciptaan Lingkungan Kondusif. Dari dokumen penting ini, ada dua hal besar dalam area tujuan ini yaitu 1) Penguatan organisasi masyarakat sipil sehingga dapat berperan lebih baik (Community System Strengthening/CSS) dan 2) Adanya kebijakan yang kondusif (termasuk didalamnya adalah dengan menghilangkan hambatan dalam hal kebijakan / Removing Legal Barriers/RLB).

Penanggulangan AIDS nasional mendapatkan dukungan dari GFATM melalui mekanisme New Funding Model (NFM) untuk kurun waktu 2016-2017, dimana Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menjadi salah satu penerima hibah utama (*Principal Recipient = PR*) untuk pelaksanaan beberapa kegiatan program. Salah satu kegiatan program yang menjadi tanggung jawab PR KPAN adalah program penguatan komunitas (CSS) dan menghilangkan hambatan legal / kebijakan (RLB).

**Untuk itu KPAN mengundang OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) untuk mengajukan proposal dan mengikuti proses seleksi Sub Recipient (SR) Nasional untuk CSS dan RLB.**

#### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SR**

1. Bertanggungjawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program CSS dan RLB sampai tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercapai seluruh tujuan dari Program ini.
2. Bertanggungjawab membangun kerjasama dengan CBOs/representasi komunitas dalam pelaksanaan program Penguatan Sistem Komunitas (CSS) dan Penghilangan Hambatan Legal (RLB) sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
3. Bertanggungjawab dan melakukan pencatatan dan pelaporan capaian program (process, output and outcome) dari CSS dan RLB.
4. Bertanggungjawab dalam pengumpulan data dan informasi program serta melakukan pelaporan program CSS-RLB kepada KPAN.

5. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan manajemen keuangan pelaksanaan program secara benar dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Bertanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas organisasi komunitas dan menghilangkan hambatan legal yang berkaitan dengan program penanggulangan AIDS di Indonesia.
7. Bekerjasama dengan PR Aisyiyah, SR KPAP, SSR KPA Kab/Kota dan PR-SR-SSR lainnya dalam mencapai target-target kerja CSS-RLB.

### **C. WILAYAH KERJA**

Program yang didukung oleh GFATM dengan New Funding Model (NFM) ini akan berlangsung selama 2 tahun dimulai dari periode 1 Januari 2016 – 30 Desember 2017. Wilayah kerja terutama pada 75 kabupaten / kota prioritas di 21 provinsi.

SR Nasional CSS-RLB Program akan mengelola dana:

- Biaya kelembagaan organisasi SR (operasional kantor & gaji staff)
- Dana Pembuatan Modul & berbagai Materi CSS-RLB
- Dana Pelatihan dan Mentoring (asistensi di daerah)
- Dana Implementasi Kegiatan di Nasional dan Kab/Kota
- Dana untuk berbagai Pertemuan Advokasi

### **D. INTERVENSI DAN UKURAN KINERJA**

1. Penguatan Sistem Komunitas (CSS):
  1. Adanya perangkat untuk memonitor / mengukur Clients Satisfaction (kepuasan beneficiaries) terhadap layanan penanggulangan AIDS.
  2. Adanya pengumpulan data, analisa serta laporan Clients Satisfaction sesuai perangkat (data dari tingkat Kabupaten/Kota)
  3. Adanya perangkat untuk memonitor / mengukur Participation Index (tingkat partisipasi komunitas dalam penanggulangan AIDS)
  4. Adanya pengumpulan data, analisa serta laporan Participation Index sesuai perangkat (data dari tingkat Kabupaten/Kota)
  5. Adanya dokumentasi dan narasi Best Practice (pembelajaran terbaik) dari partisipasi CSO dalam program penanggulangan AIDS.
  6. Adanya strategi advokasi isu-isu utama program kolaborasi TB-HIV.
  7. Adanya komitmen / dokumen tertulis pemangku-kepentingan kunci (key stakeholders) dalam peningkatan anggaran program TB-HIV
  8. Adanya komitmen / dokumen tertulis pemangku-kepentingan kunci (key stakeholders) dalam peningkatan akses populasi kunci miskin (KAP) dalam layanan JKN.

2. Penciptaan Lingkungan Kondusif melalui Removing Legal Barriers (RLB)
  1. Adanya dokumen narasi dan analisis tentang hambatan legal (legal review) terhadap program dan/atau pasien TB-HIV di Indonesia
  2. Adanya kapasitas komunitas sebagai paralegal serta berfungsinya paralegal dari unsur komunitas terdampak HIV-AIDS pada tingkat Kabupaten/Kota
  3. Adanya perangkat untuk memonitor pemenuhan hak-hak kesehatan kelompok terdampak TB-HIV
  4. Adanya pengumpulan data, analisa serta laporan terkait pelaksanaan / pemenuhan hak-hak kelompok terdampak.
  5. Adanya dialog / consultative meeting yang signifikan antara komunitas dengan pemangku-kepentingan utama (khususnya dengan Pemerintah dan DPR, baik di tingkat Pusat maupun Daerah).
3. Peningkatan Kemitraan
  1. Adanya kerjasama kemitraan strategis antara komunitas, pemerintah dan sektor swasta dalam penegakkan hak-hak kesehatan komunitas.

## **E. KRITERIA SELEKSI**

### **Organisasi (Calon SR) agar menunjukkan bukti :**

1. Terdaftar sebagai entitas legal di Departemen Hukum & HAM atau Kemendagri atau Kesbangpol (atau sejenisnya)
2. Memiliki Kantor dengan Alamat jelas yang dapat diverifikasi (dengan Surat Domisili)
3. Adanya SOP organisasi (manajemen, keuangan, programatik, dll)
4. Memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan dana bantuan, termasuk sumber dana eksternal seperti Global Fund, Indonesia Partnership Fund, DFAT, USAID dan sebagainya. Apabila memiliki bukti data penyerapan dana dan riwayat Rating serta Hasil Audit Keuangan atau Acknowledgment Letter / Document dari pemberi dana akan memberikan nilai tambah. (dokumen dilampirkan).
5. Memiliki Profil Organisasi terbaru (tahun 2015) termasuk dengan deskripsi profile Sumber Daya Manusia (CV SDM) yang bekerja dalam Organisasi (yaitu CV Pimpinan Lembaga dan CV SDM kunci didalam lembaga).
6. Bersedia berkontribusi terhadap program, dalam bentuk ruang kantor, SDM, peralatan kantor, dll (dilampirkan dalam surat kesanggupan dan rincian kontribusi yang akan diberikan)
7. Organisasi berbasis komunitas atau individu lintas populasi kunci.
8. Organisasi sudah didirikan (established) minimal 2 tahun.
9. Memiliki produk / good practices advokasi isu strategis (laporan kerja-kerja advokasi di dokumentasi dengan baik proses dan hasilnya dan disertakan dalam proposal aplikasi)
10. Diutamakan telah memiliki sistem penguatan & monitoring berbasis komunitas.
11. Memiliki pengalaman bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
12. Memiliki pendekatan kreatif / unik dalam melakukan advokasi (dijelaskan dalam proposal aplikasi)

## **F. PROSES SELEKSI**

Tim PR akan melaksanakan verifikasi administrasi, hasil verifikasi akan diajukan untuk proses lebih lanjut kepada Tim Panel Seleksi

Tim Panel Seleksi terdiri dari : Perwakilan Country Coordinating Mechanism (CCM), Technical Working Group (TWG), Kementerian Kesehatan (Sub Direktorat AIDS), perwakilan komunitas populasi kunci, Development Partners, Profesional dan KPAN.

## **G. PENILAIAN**

Setiap Organisasi yang mengajukan aplikasi akan dinilai oleh Tim Seleksi.

1. Hasil penilaian Lolos Seleksi dengan Syarat
  - a. Melengkapi dokumen administrasi / teknis yang dianggap kurang memadai (sesuai tenggat waktu yang diberikan)
2. Lolos Seleksi
  - a. Selanjutnya akan diminta menyampaikan Presentasi Program dan Wawancara
  - b. Tim akan melaksanakan assessment ke institusi langsung ke lapangan (sesuai kebutuhan)
3. Tidak lolos seleksi

## **H. FORMAT PROPOSAL**

Setiap organisasi yang berminat agar menyampaikan surat (Letter of Interest) permohonan / peminatan untuk menjadi SR dengan melampirkan proposal.

Proposal ditulis dalam format maximum 20 halaman, ditulis dalam bahasa Indonesia dan kertas A4. Proposal berisi bagian sebagai berikut:

- Halaman Depan/Cover;
- Executive Summary (Summary harus menjelaskan kunci dasar dari strategy, pendekatan, metodologi, personnel dan rencana implementasi)
- Isi Proposal
  - Latar Belakang Organisasi
  - Kinerja / Capaian Penting Organisasi (dalam hal penguatan sistem komunitas/CSS dan penciptaan lingkungan yang kondusif/RLB)
  - Strategi, pendekatan, metodologi program CSS-RLB
  - Portofolio Organisasi (daftar semua kegiatan/projek yang dilakukan organisasi)

- Penjelasan / substansi lain yang dianggap perlu untuk menilai kapasitas organisasi dalam melaksanakan CSS-RLB.
- Lampiran
  - Seluruh lampiran yang diperlukan untuk memenuhi Kriteria Administrasi (pada ketentuan diatas)

## I. JADWAL SELEKSI

No	Waktu	Proses
1	15 Jan 2016	Pengumuman Call for Proposal SR Nasional Program Penjangkauan WPS dan Pelanggan melalui website KPAN: <a href="http://www.aidsindonesia.or.id">http://www.aidsindonesia.or.id</a>
2	15 – 22 Jan 2016	Pengiriman Surat Pengajuan (Letter of Interest) oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melalui aplikasi: <a href="http://www.aidsindonesia.or.id/oms">http://www.aidsindonesia.or.id/oms</a> (upload Surat Pengajuan pada isian “Lainnya”)
3	19 – 26 Jan 2016	Pengiriman Proposal dan Dokumen Pendukung (softcopy) oleh OMS melalui aplikasi: <a href="http://www.aidsindonesia.or.id/oms">http://www.aidsindonesia.or.id/oms</a>
4	26 Jan 2016	Batas Akhir Pengiriman Softcopy (atau Hardcopy), Selasa, 26 Januari 2016, pukul 17.00 WIB  Alamat Pengiriman: Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPA Nasional Sekretariat KPA Nasional, Wisma Sirca Lt. 2 Jalan. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat - 10340 Telp : +6221 390 5918; Fax : +6221 390 5919
5	28 Januari 2016	Pengumuman OMS Lolos Seleksi (untuk mengikuti proses lebih lanjut)

Jika terdapat kebutuhan informasi dan pertanyaan; maka dapat dikirimkan kepada Panitia Pengadaan KPAN melalui email: [procurement@aidsondonesia.or.id](mailto:procurement@aidsondonesia.or.id)